

**AKSI DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN OLEH
MAHASISWA DI KOTAMADYA LJUNG PANDANG
(Suatu Telaah Sosiologi Hukum)**



OLEH :
L I N G G I

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"
LJUNG PANDANG
1998

AKSI DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN OLEH
MAHASISWA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG
(Suatu Telaah Sosiologi Hukum)



S K R I P S I

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Fakultas Hukum Universitas "45"
Ujung Pandang

OLEH :

L I N G G I

4591060042/9911100310016

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS "45"

UJUNG PANDANG

1998

HALAMAN PENERIMAAN

Berdasarkan surat keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang Nomor : A.002/FH/U-45/1/1999 Tanggal, 7 Januari 1999 Tentang Panitia Ujian Skripsi, maka pada hari Senin Tanggal, 11 Januari 1999 skripsi ini diterima dan disahkan setelah dipertahankan oleh Linggi No. Stb/Nirm 4591060042/9911100310016 di depan Panitia Ujian skripsi, guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan yang terdiri dari

PENGAWAS UMUM
REKTOR UNIVERSITAS "45"
ULUJUNG PANDANG

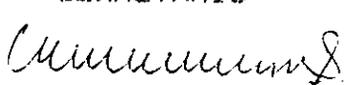
REKTOR
DR. ANDI JAYA SOE, SE, MBA

PANITIA UJIAN SKRIPSI

K E T U A


RACHMAD BARO, SH, MH

SEKRETARIS


SITI ZUBAIDAH, SH, MH

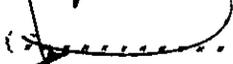
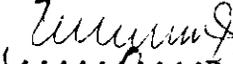
TIM PENGUJI :

KETUA : PROF. DR. RUSLI EFFENDY, SH

ANGGOTA : 1. RACHMAD BARO, SH, MH

2. SITI ZUBAIDAH, SH, MH

3. MARWAN NAS, SH, MH


(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

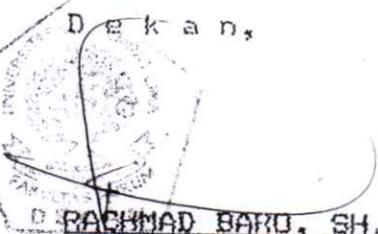


Skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa : L I N G G I
Nomor Stambuk/Nirm : 4591060042/791100310016
Program Studi : Ilmu-Ilmu Hukum
B a g i a n : Hukum Masyarakat dan Pembangunan
Tanggal Pendaftaran : 12 Oktober 1998
Nomor Pendaftaran :
Tanggal Persetujuan : 05 Januari 1999

Telah diterima dan disetujui oleh Dekan Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang untuk diajukan dalam ujian skripsi mahasiswa program strata satu (S-1).

Ujung Pandang, 1998

D e k a n,

D. RACHMAD BARO, SH, MH.



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Tiada kata yang patut penulis ucapkan selain ungkapan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, karena dengan inayah dan megfirah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **AKSI DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN OLEH MAHASISWA DI KOTAMADYA UJUNG PANDANG (SUATU TELAAH SOSIOLOGI HUKUM)**. Sebagai tugas akhir untuk menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas "45".

Skripsi ini penulis persembahkan khusus kepada orang tua yang tercinta Ayahanda FASEBA (Almarhum) dan Ibunda Rukan, saudara M. Yunus, Rasbi Lebang, dan Istri tercinta Harianti semoga limpahan rahmat mencurahkan kepada mereka yang telah memberikan bantuan dan dorongan kepada penulis sehingga semua ini dapat selesai dengan baik.

Selesainya skripsi ini adalah berkat bantuan pengarahan dan bimbingan Bapak PROF. DR. RUSLI EFFENDY, SH sebagai pembimbing pertama dan Bapak RACHMAD BARO, SH, MH, sebagai pembimbing kedua kepadanya penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya.

Demikian pula penulis tidak lupa menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Rachmad Baro, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas "45". Ibu Sitti Zubaidah, SH, MH, Ruslan Renggong, SH, MH, Marwan Mas, SH, MH, masing-masing sebagai Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II, Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas "45".
2. Bapak Zulkifli Makkawaru, SH selaku Ketua Bagian Hukum Masyarakat dan Pembangunan Fakultas Hukum Universitas "45".
3. Para Dosen Fakultas Hukum Universitas "45" atas bantuannya, didikan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis selama masih dalam bangku kuliah.
4. Para Pegawai Fakultas Hukum Universitas "45" atas bantuannya selama masih dalam bangku kuliah.
5. Staf Humas DPRD Tk. I Sulawesi Selatan yang telah memberikan bantuan selama penelitian.
6. Bapak Lettu POL. Abd. Salam, Kaur Bin OPS Poltabes Ujung Pandang
7. Sahabat-sahabat penulis yaitu Jamaluddin, SH, Samsul Irawan, SH, Muh. Nasir, SH, Try Ubaya Sakti, SH, Sofyan, SH, Suprianto Sulawijaya, Arianto M. Patalle, rekan-rekan mahasiswa yang tidak dapat penulis sebut satu persatu, atas persaudaraannya dan kebersamaannya selama ini.



Akhirnya penulis menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak, semoga Allah SWT, memberikan balasan yang berlipat ganda, meskipun skripsi ini masih jauh dari sempurna, namun penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Wassalam,

Ujung Pandang, Januari 1998

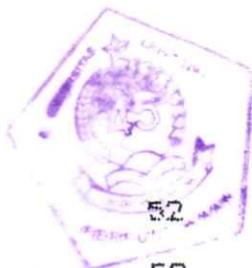
Penulis,

L I N G G I

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah	2
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	3
1.4. Metode Penelitian	4
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Pengertian Demonstrasi	7
2.2. Demonstrasi sebagai Wujud Social Control	11
2.3. Mahasiswa Sebagai Penyalur Aspirasi	17
BAB 3 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	24
3.1. Faktor Penyebab Terjadinya Demonstrasi	24
3.2. Tujuan Demonstrasi	34
3.3. Pengaruh Demonstrasi terhadap Reformasi	41
3.4. Dampak Demonstrasi terhadap Kehidupan Masyarakat	45



BAB 4 PENUTUP	52
4.1. Kesimpulan	52
4.2. Saran-saran	53
DAFTAR PUSTAKA	54



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel	Teks	Halaman
1.	Surat keterangan melakukan penelitian dari DPRD No. 070/596/DPRD/1998 tertanggal 3 Nopember 1998	46
2.	Izin penelitian/survey/pengambilan data ter- tanggal 6 Nopember 1998	47



DAFTAR TABEL

Tabel	Teks	Halaman
1.	Pendapat responden tentang faktor penyebab terjadinya demonstrasi	24
2.	Data demonstrasi tahun 1994 - 1998	30
3.	Tujuan demonstrasi	39
4.	Pandangan responden terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa	40
5.	Pendapat responden mengenai dampak demonstrasi terhadap kehidupan masyarakat	50

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijaksanaan Pemerintah di bidang ekonomi, hukum dan politik serta sosial budaya di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kotamadya Ujung Pandang tidak selamanya sesuai dengan aspirasi masyarakat, tetapi kadangkala justru menimbulkan masalah dan proses dari kelompok masyarakat terutama mahasiswa yang selalu berfikir ilmiah, analistis dan objektif dalam menilai suatu tatanan yang diambil penentu kebijakan pembangunan dalam bidang tertentu. Seperti halnya di bidang pembangunan hukum.

Mahasiswa sebagai masyarakat ilmiah dan insan akademik yang melakukan aksi demonstrasi sering mendapat sikap yang tidak wajar dari pihak aparat keamanan yang menanggapi aksi itu melalui reformasi damai yang dilakukan mahasiswa yang kini semakin berkembang yang menghendaki terwujudnya reformasi sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Aksi demonstrasi sebenarnya adalah wujud aspirasi masyarakat yang menghendaki reformasi dalam bidang politik; hukum dan sosial budaya yang dapat

mengantar masyarakat pada tingkat kehidupan yang layak dan sesuai dengan tujuan pembangunan.

Sehubungan dengan uraian tersebut, di Kotamadya Ujung Pandang, aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa mendapat tantangan dari pemerintah, bahkan ada mahasiswa menjadi korban sehingga menimbulkan masalah hukum.

Kelompok mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi sampai saat ini sekarang ini, masih merupakan suatu komponen terbesar yang fungsinya selalu sosial control yang efektif, komunikatif serta dapat mengubah tatanan politik, hukum dan ekonomi serta sosial budaya yang oleh masyarakat dinilai tidak sesuai dengan aspirasi dan kehendak rakyat. Demikian yang menjadi latar belakang masalah sehingga topik aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang dipilih dan diangkat dengan judul : Aksi Demonstrasi yang dilakukan oleh Mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang (Suatu Telaah Sosiologi Hukum).

1.2. Rumusan Masalah

Masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini, di batasi sebagai berikut :

- (1) Faktor apakah yang melatar belakang para mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang melakukan aksi demonstrasi?
- (2) Apakah tujuan yang ingin di capai mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang melakukan aksi demonstrasi?
- (3) Sejuahmana pengaruh aksi demonstrasi yang dilakukan kelompok mahasiswa terhadap terjadinya reformasi ekonomi, politik dan hukum?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

(1) Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui faktor yang melatar-belakangi mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di Kotamadya Ujung Pandang.
- b. Untuk mengetahui tujuan yang ingin dicapai mahasiswa melakukan aksi demonstrasi di Kotamadya Ujung Pandang.
- c. Untuk mengetahui pengeruh aksi demonstrasi mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang terhadap terwujudnya reformasi ekonomi, politik, hukum dan sosial budaya.

(2) Kegunaan Penelitian

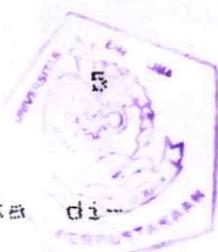
- a. Hasil penelitian ini, diharapkan menjadi masukan yang berarti bagi pemerintah terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang.
- b. Dapat dijadikan masukan bagi peneliti berikutnya, khusus peneliti yang mengkaji aksi demonstrasi.
- c. Hasil penelitian ini dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan aksi demonstrasi dan reformasi hukum.

1.4. Metode Penelitian

Dalam rangka pengumpulan data dalam penyusunan skripsi ini, terlebih dahulu ditentukan lokasi penelitian dan metode yang dipergunakan sebagai berikut:

(1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dipilih yaitu Kotamadya Ujung Pandang. Alasan untuk memilih daerah ini, karena Kotamadya Ujung Pandang merupakan Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan serta merupakan pusat pendidikan yang dilakukan



mahasiswa, intensitasnya lebih tinggi jika dibandingkan Daerah Tingkat II lainnya di Sulawesi Selatan.

(2) Teknik Pengumpulan Data, dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Penelitian Kepustakaan (Library Research), dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum dan majalah serta surat kabar. Data yang diperoleh merupakan data sekunder dan sekaligus dijadikan landasan teori untuk melakukan penelitian lapangan.

b. Penelitian Lapangan (Field Research), dilakukan dengan teknik:

1. Observasi, yakni melakukan pengamatan di lokasi penelitian sambil mencatat gejala yang terjadi dan kecenderungan perilaku responden secara nyata.

2. Wawancara, dilakukan terhadap tokoh mahasiswa, praktisi hukum, aparat DPRD Tingkat II Ujung Pandang.

3. Angket, dibagikan kepada 50 responden yang dipilih secara acak, terdiri dari beberapa komponen, yang diperinci sebagai berikut:

a. Mahasiswa	:	25 Orang
b. Pedagang	:	10 Orang
c. Sopir angkutan umum	:	10 Orang
d. Pelajar SLTP dan SLTA	:	5 Orang

Jumlah : 50 Orang

(3) Analisis Data, Data yang berhasil dikumpulkan dari pembagian angket, data tersebut disajikan dalam bentuk tabulasi frekuensi (f), kemudian di analisis secara kualitatif.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Demonstrasi

Menyalurkan aspirasi politik merupakan tuntutan pembaharuan demokrasi, sebagai partisipasi warga masyarakat dalam membina pembangunan politik. Hal ini menggambarkan bahwa prinsip-prinsip demokrasi, mengandung perbedaan pendapat yang bertujuan mencari pemecahan yang bijak.

Dalam demokrasi, aspirasi rakyatlah yang memegang pemerintahan sebagaimana dikemukakan oleh Marwan Mas (1996:46) bahwa:

Dalam demokrasi aspirasi rakyatlah yang memegang pemerintahan (demos rakyat, dan kratein Pemerintahan). Artinya, dalam demokrasi jaminan terhadap pelaksanaan hak-hak rakyat harus didahulukan, mengingat rakyatlah yang memerintah dan hanya didelegasikan kepada pemerintah atas pilihan wakil-wakilnya di DPR/MPR.

Selama ini kondisi perpolitikan Indonesia pada umumnya, khususnya di kotamadya Ujung Pandang masih diwarnai aksi demonstrasi mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi.

Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa, merupakan cerminan dari timbulnya berbagai masalah

sosial dalam masyarakat, sebagai akibat langsung dari kebijakan pemerintah yang dinilai tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat ataupun bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

Meekipun dalam kepustakaan hukum, tidak dijumpai suatu pengertian konkret tentang demonstrasi, tetapi sebagai acuan dasar dapat dikemukakan bahwa demo berarti aksi protes yang dilakukan oleh mahasiswa (Fajar, tgl 2-11-1998).

Selanjutnya, demonstrasi berarti unjuk rasa (Bina Baru, tgl 6-11-1998). Berdasarkan uraian ini, maka aksi demonstrasi mahasiswa adalah suatu gerakan turun ke jalan dengan cara menggelar spanduk, berisi protes dan harapan, yang intinya menuntut pihak pemerintah merubah atau mengambil kebijaksanaan baru di bidang politik yang tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Edisi yang lain, dijelaskan bahwa demonstrasi adalah suatu pernyataan mahasiswa yang menuntut pembaharuan, pengunduran pejabat serta perubahan politik (Bina Baru tgl 4-11-1998).

Menyimak pengertian demonstrasi tersebut di atas, maka demonstrasi baru merupakan tahap untuk menuju ke reformasi, sedangkan reformasi sudah

merupakan tahap perubahan tatanan politik. Jadi reformasi menginginkan adanya perubahan dan perbaikan sekaligus instropeksi diri.

Dalam kaitan ini, Achmad Ali (Fajar, 1978:4) mengemukakan:

Reformasi bukan revolusi, karena itu bukan untuk mengubah sistem, melainkan menyempurnakan sistem yang ada. Oleh karena itu tepatlah jika yang harus dilakukan pemerintah sekarang adalah salah satunya memperbaiki penegakan hukum, menyempurnakan penegakan hukum, menyempurnakan perwujudan azas hukum "equal justice under law" (semua orang sama kedudukannya di bawah hukum).

Makna reformasi dalam aksi demonstrasi mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang adalah bertujuan untuk melakukan perubahan di segala bidang. Dalam kenyataannya, di satu sisi pembangunan dalam suatu bidang tertentu digalakkan oleh pemerintah, tetapi di sisi lain, pembangunan yang digalakkan itu justru tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat yang mendambakan adanya perbaikan nasib atau perwujudan hak-hak kemerdekaannya. Umumnya menyoroti pemerintah karena melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum.

Pada garis besarnya, demonstrasi yang dilakukan mahasiswa merupakan pencerminan dari pasal

28 Undang-undang Dasar Tahun 1945, sehingga secara politis, suatu negara yang menganut kekuasaan hukum dan konstitusional harus ada kesesuaian.

Oleh karena itu, sistem dan lembaga peradilan merupakan tanggung jawab politik dari semua lembaga pemerintah, lembaga penegakan hukum dan lembaga-lembaga dalam masyarakat, hal tersebut diharapkan menjadi pilar berfungsinya hukum dengan baik di dalam masyarakat.

Banyak ketidaksesuaian selama ini dijadikan tema sentral demonstrasi mahasiswa, misalnya kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme selanjutnya disingkat KKN di dalam pelaksanaan kekuasaan pemerintahan.

Demonstrasi mahasiswa yang tujuannya untuk merubah tatanan hukum, politik dan ekonomi selama ini pada prinsipnya masih tetap menjaga persatuan bangsa, menuju ke arah kemajuan adab. Dalam kaitan ini Andi Zainal Abidin Farid dan Rachmad Baro (1996:13) mengemukakan bahwa usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab budaya dan persatuan bangsa. Pendapat ilmuan ini, adalah sangat sesuai dengan kondisi saat ini jika demonstrasi dilihat dari konteks budaya sebab mahasiswa yang turun ke jalan dengan menggelar spanduk serta protes sudah



membudaya di Indonesia tetapi aksi demonstrasi tersebut tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Sejak reformasi bergulir, semua faktor dikritik dan di demo. Semua dituntut untuk fulgar terhadap peraturan. Dari kelas teri hingga kakap tiba-tiba jadi reformas serta ahli, dari hukum, ekonomi, sosial, pendidikan dan kesehatan. Mereka menuntut tanpa adanya kecuali (Tabloid Pratama, tgl. 10-11-1998).

Hal di atas terjadi sebagai akibat pengaruh aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa untuk melakukan reformasi di segala bidang pembangunan.

2.2. Demonstrasi Sebagai Wujud Social control

Jika ditelaah dari sudut kajian sosiologi hukum, maka demonstrasi merupakan perwujudan kepedualian sosial terhadap gejala yang berkembang, akibat terjadinya benturan antara kepentingan masyarakat dan pemerintah, sehingga demonstrasi mahasiswa merupakan tindakan kontrol terhadap pemerintah.

Kontrol sosial, sebagaimana tujuan demonstrasi umumnya tertuju kepada pemerintah pusat dan daerah.

yang menyimpang dari hukum yang dicita-citakan atau *ius contituendum*.

Demostrasi mahasiswa pada hakikatnya adalah mempunyai fungsi kontrol terhadap kepincangan hukum, ekonomi, politik, karena:

- a. Memprotes masalah yang terjadi dalam masyarakat.
- b. Menginginkan adanya perubahan dalam masyarakat pada saat pemerintah menentukan kebijaksanaan.
- c. Menuntut pemerintah daerah dan pusat untuk mengubah kebijaksanaannya karena hanya merugikan bangsa dan negara.
- d. Menghendaki pergantian pejabat yang terlibat KKN.
- e. Menolak sistem dan tatanan pemerintahan yang tidak sesuai dengan kehendak dan hati nurani rakyat.

Demostrasi tersebut, masih dilakukan dengan tetap berpedoman pada ketentuan hukum yang berlaku. Sebab Negara Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat, rule of law*), yang secara jelas dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 yang berarti setiap sikap/tindakan warga negara harus sesuai

dengan hukum yang berlaku. Cita-cita negara hukum ini bukan sekedar menciptakan hukum atas dalam kekuasaan belaka.

Uraian tersebut di atas, jika dihubungkan dengan TAP MPR No. X Tahun 1998 tentang pokok-pokok Reformasi Dalam Rangka Normalisasi. Pada pasal 4 dalam TAP MPR ini menugaskan kepada Presiden B.J. Habibie untuk melanjutkan pembangunan, yang sesuai dengan aspirasi masyarakat Indonesia.

Masih erat kaitannya dengan uraian di atas, Soejono, D (1985:67) mengemukakan:

Indonesia dikenal sebagai negara hukum, di mana hukum diciptakan bertujuan agar dalam masyarakat dan terjamin adanya ketertiban dan keadilan yang bentuknya seperti Undang-Undang, yang kadang hukum bangkit, dilembagakan, direncanakan, diatur, di paksakan oleh fungsionaris-fungsionaris serta pejabat politik dari suatu negara.

Ada hal yang menarik ditelaah dari pendapat tersebut yaitu hukum kadang dipaksakan oleh para fungsionaris hukum agar diberlakukan dalam masyarakat, yang berakibat masyarakat tidak menerima baik hal itu, sehingga protes masyarakat tersebut diwakili oleh mahasiswa melakukan demonstrasi.

Aksi demonstrasi mahasiswa dalam kaitannya dengan reformasi hukum untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, karena hukum tidak sekedar bertujuan agar warga masyarakat teratur dan tertib, melainkan juga harus mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum yang sesuai dengan kebutuhan rakyat.

Dikatakan demonstrasi yang selama ini dilakukan oleh kelompok mahasiswa merupakan suatu kontrol sosial karena apa yang diperjuangkan mahasiswa tersebut tidak lain adalah perubahan yang mendasar dan sesuai dengan hukum, sebab kadang kebijaksanaan pemerintah dinilai oleh masyarakat merugikan serta tidak sesuai dengan hukum. Masalah-masalah yang berkaitan dengan aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa karena kebijaksanaan itu tidak sistematis, tidak sinkron, belum cukup, belum sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada. Maka dengan dikeluarkannya TAP MPR No. X Tahun 1998 tersebut bertujuan untuk merubah atau menata kembali kebijaksanaan pemerintah rezim Orde Baru yang dinilai tidak mencerminkan Indonesia sebagai negara hukum. Serta lebih sesuai dengan tuntutan masyarakat saat ini.

Dalam hal ini Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah (1980:14) mengemukakan bahwa:

1. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sistematis?
2. Apakah peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu cukup sinkron? Artinya:
 - a. Apakah secara hirarkis tidak ada pertentangan?
 - b. Apakah secara horisontal tidak ada pertentangan?
3. Apakah secara kuantitatif dan kualitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup?
4. Apakah penerbitan peraturan-peraturan tertentu adalah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada?

Era kaitannya dengan uraian di atas, Bruce J. Cohen (Sahav Simamora, 1983:205) mengemukakan:

Apabila reformasi sosial yang menuntut pernyataan control social diusulkan, maka wajar bila ada beberapa anggota masyarakat yang menentang pembaharuan ini. Karena adakalanya perlu bagi individu-individu dalam keadaan tertentu untuk melakukan perubahan dalam perilaku mereka agar sejalan dengan reformasi sosial yang bersangkutan, maka muncullah control social baru yang harus dijalankan.

Seringkali pembaharuan yang diusulkan ditentang karena ada orang tertentu yang khawatir akan kehilangan status dan karena mereka ingin terus berada dalam keadaan yang sama.

Selanjutnya Soerjono Soekanto (1986:295)

mengemukakan bahwa:

Secara sosiologis, agar suatu perubahan dapat terjadi, maka harus dipenuhi syarat-syarat tertentu antara lain:

- a. Harus ada keinginan umum untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan harus ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan keadaan tersebut.
- b. Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang di anggap mampu memimpin masyarakat tersebut.
- c. Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut, untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi gerakan masyarakat.
- d. Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan satu tujuan pada masyarakat. Artinya adalah bahwa tujuan tersebut terutama sifatnya konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. Di samping itu diperlukan juga suatu tujuan yang abstrak. Misalnya, perumusan suatu ideologi tertentu.
- e. Harus ada momentum, yaitu suatu saat di mana segala keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk mulai dengan gerakan tersebut. Apabila momentum yang dipilih keliru, maka usaha itu dapat gagal.

Berkaitan dengan pendapat ahli sosiologi hukum di atas, maka tidak dilakukan aksi demonstrasi kalau tidak terjadi permasalahan dalam bidang tertentu

dalam masyarakat sebagai akibat kebijaksanaan pemerintah dinilai tidak berdasarkan aspirasi masyarakat.

Daniel S. Lev (1991:8) mengemukakan bahwa:

Hubungan-hubungan kekuasaan yang bersifat sosioekonomis, yang akhirnya menentukan perubahan yang sebenarnya pada posisi sosial ekonomi tidak dimasukkan dalam temanya.

Pendapat Daniel S. Lev ini, kalau disimak secara mendalam, maka suatu kebijaksanaan baru yang diambil oleh pemerintah akan menentukan suatu perubahan yang mendasar.

2.3. Mahasiswa Sebagai Penyalur Aspirasi

Selama ini kondisi perpolitikan Indonesia masih diwarnai benturan kepentingan antara penguasa dengan rakyat. Demikian pula harapan rakyat agar partai politik (Parpol) menjadi pembela kepentingan rakyat. Akibatnya beberapa kelompok dalam masyarakat seperti kelompok mahasiswa lebih memilih turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi untuk mewakili masyarakat menyalurkan aspirasi sebagai wujud partisipasi politik.

Menurut Gabriel A. Almond (1987:52) partisipasi politik dapat terjadi dalam dua bentuk, yaitu:

1. Bentuk konvensional, yaitu pemberian suara (voting), diskusi politik kegiatan kampanye, membentuk atau bergabung dalam organisasi, komunikasi individu dengan pejabat politik dengan administratif.
2. Bentuk non konvensional, yaitu pengajuan petisi, demonstrasi (unjuk rasa), mogok, revolusi, dan perang gerilya.

Kalau dihubungkan dengan kondisi saat ini, butir kedua diatas sudah diwujudkan oleh masyarakat. Dengan demikian perlu ada kesamaan persepsi dalam menyalurkan aspirasi politik melalui demonstrasi.

Penyaluran aspirasi rakyat oleh mahasiswa dalam aksi demonstrasi, harus disesuaikan dengan nilai etika dan moral serta Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Melakukan aksi demonstrasi, tidak dibenarkan jika menyebarkan rasa permusuhan, merusak atau menghancurkan bangunan yang mempunyai fungsi untuk kepentingan umum atau milik individu atau badan hukum. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan dinamika internal melalui pembaharuan-pembaharuan, sehingga dalam sistem politik dan demokrasi tidak terjadi benturan antara keinginan pemerintah dengan aspirasi masyarakat.



Sistem politik yang memperjuangkan kepentingan rakyat, seperti yang dilakukan mahasiswa mewakili aspirasi masyarakat melakukan aksi demonstrasi. Dengan demikian partisipasi politik dalam bentuk demonstrasi tersebut, merupakan protes keras masyarakat karena masalah pengusuran ataupun penindasan oleh penguasa yang tidak selayaknya. Oleh karena itu, dalam kenyataan sekarang ini banyak warga masyarakat yang berkorban untuk pembangunan tetapi tidak mendapat imbas yang sesuai. Selain itu banyak kebijakan yang diambil oleh pemerintah tidak sesuai dengan kehendak rakyat, malah mempersulit masyarakat akibat kebijaksanaan itu, misalnya kebijaksanaan pemerintah terhadap kenaikan bahan bakar minyak (BBM) serta kenaikan biaya transportasi

Pada masyarakat yang sedang membangun seperti di Indonesia pada umumnya, khususnya dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang, perubahan hukum akan sangat berpengaruh terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat yang tentunya telah diperjuangkan oleh kelompok mahasiswa di era reformasi sekarang ini. Melalui aksi demonstrasi yang mereka lakukan dengan menyoroti kebijakan-kebijakan pemerintah yang dinilai tidak bersesuaian dengan hukum sekarang ini.



Mengedepankan hukum sebagai salah satu sarana pembaharuan, akan berdampak positif di dalam mengiringi pesatnya bidang-bidang pembangunan. Kiranya perlu menentukan prioritas-prioritas tujuan-tujuan yang hendak dicapai sehingga data-data konkret yang diperoleh dapat direalisasikan dalam bentuk norma-norma hukum.

Peranan yang diharapkan dari hukum untuk lebih meluruskan permasalahan yang terjadi, harus dibarengi dengan kesamaan persepsi antara rakyat dengan pemerintah, oleh karena hukum berasal dan berproses dalam masyarakat, sehingga pembaharuan hukum dalam era reformasi ini tidak mungkin dilepaskan secara mutlak dari kondisi dan masalah yang dihadapi masyarakat. Hal ini berarti bahwa masalah pembangunan dalam bidang, hukum dan politik serta ekonomi maupun sosial budaya yang dihadapi masyarakat yang heterogen harus diharmonisasikan oleh hukum dengan nilai-nilai intrinsik yang dianut oleh masyarakat.

Selain itu, hukum yang buruk juga tidak dapat diubah semata-mata dengan mengendalikannya atas dasar asumsi bahwa hukum yang baik akan menghasilkan yang baik pula. Peranan yang diharapkan dari hukum

adalah memprioritaskan pembuatan hukum baru yang mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional secara menyeluruh, tetapi tidak merugikan kepentingan masyarakat.

Kebijakan pemerintah dalam memberlakukan suatu aturan hukum, tentunya akan melapangkan jalan ke arah proses adaptasi masyarakat dengan pembaharuan, karena pembangunan merupakan proses perubahan yang terencana, sehingga semua pihak harus turut berperan aktif.

Gerakan demonstrasi mahasiswa merupakan suatu substansi reformasi menyeluruh terhadap pelaku KKN di Kotamadya Ujung Pandang dan di Daerah Tingkat II. Sorotan mahasiswa dalam melakukan aksi tersebut adalah yang lain reformasi politik, ekonomi termasuk reformasi hukum.

Gerakan reformasi bergulir karena kuatnya praktek KKN, penyimpangan tatanan ekonomi, politik dan hukum, karena itu demonstrasi dimaksudkan untuk mengungkap para pelaku KKN.

Terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa karena pandangan moral serta etika. Imam Walujo (1981:86), mengemukakan:

Pandangan moral serta etika kelompok orang dalam kurun waktu tertentu tentang yang baik dan yang buruk, yang pantas dan yang tidak layak ataupun yang terpuji dan tercela, secara historis mengalami perkembangan dalam varian intensitasnya.

Timbulnya reaksi dari arus bawah yang diwakili kaum terpelajar (mahasiswa) karena adanya penilaian masyarakat yang tercela terhadap pejabat tertentu yang dipandang melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum, seperti yang dikemukakan Moeljatno (1983:2) bahwa:

Bertentangan dengan tata atau keterkaitan yang dikehendaki oleh hukum, karena merugikan masyarakat dalam arti menghambat akan terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil.

Bertentangan dalam hal ini, dimaksudkan bahwa kebijakan pemerintah yang dinilai masyarakat bertentangan dengan hukum. Kebijakan yang dinilai bertentangan dengan hukum tersebut oleh Wirjono Prodjodikoro (1985:147) dinyatakan di muka umum, dalam bentuk demonstrasi.

Berdasarkan pendapat di atas, gerakan reformasi dalam konteks demonstrasi yang dipelopori mahasiswa merupakan koreksi total terhadap berbagai kesalahan yang dilakukan pemerintah rezim orde baru.



Dengan demikian, perjuangan untuk mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat serta memulihkan hak-hak rakyat di bidang ekonomi, politik dan hukum, sekaligus menentang segala bentuk KKN.

BAR 3

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1. Faktor Penyebab terjadinya Demonstrasi

Sebelum mengemukakan faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang mengetengahkan pendapat yang diperoleh dari 50 responden sebagai berikut:

TABEL 1

PENDAPAT RESPONDEN TENTANG FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA DEMONSTRASI

Pertanyaan: Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa?

N = 50

No	Faktor Penyebab	F	%
1	Kenaikan harga bahan bakar minyak	3	6
2	Kenaikan tarip angkutan	2	4
3	Tindakan oknum ABRI	8	16
4	Karena korupsi yang dilakukan oleh pejabat	18	36
5	Karena penyalahgunaan wewenang	19	38
	Jumlah	50	100

Sumber : Diolah dari angket, Tahun 1998.

Perbedaan angka-angka frekwensi dan persentase jawaban responden di atas, menunjukkan bahwa paling



banyak responden mengatakan faktor penyebab terjadinya aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang karena penyalahgunaan wewenang, dan urutan kedua karena korupsi yang dilakukan oleh pejabat.

1. Kenaikan Bahan Bakar Minyak atau BBM

Sorotan serta protes mahasiswa yang sebenarnya hanya mewakili aspirasi masyarakat dalam Kotamadya Ujung Pandang untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak oleh BBM, dimulai ketika Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan H.Z.B. Palaguna beserta jajarannya melakukan suatu kebijaksanaan untuk menaikkan BBM yang merupakan realisasi dari kehendak pemerintah pusat ternyata kenaikan itu tidak dapat diterima oleh masyarakat di Indonesia pada umumnya, khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan.

Kenaikan BBM tersebut, diprotes oleh sejumlah kelompok mahasiswa, baik di Jakarta maupun di Ujung Pandang menginginkan agar kebijaksanaan itu ditinjau kembali pemerintah karena menambah penderitaan rakyat, terutama bagi kalangan pengusaha angkutan dan masyarakat pada umumnya.

Aksi demonstrasi oleh kelompok mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di daerah ini mulai melakukan protes dengan menggelar spanduk dalam bentuk arak-arakan turun ke jalan hingga memacetkan angkutan kota. Protes tersebut ternyata tidak ditanggapi positif oleh pemerintah daerah. Mahasiswa tidak berputus asa dalam memperjuangkan kehendak rakyat, lalu kelompok mahasiswa itu ke Kantor DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan guna berdialog langsung dengan aparat DPRD, akhirnya dialog itu membuahkan hasil, BBM berhasil diturunkan dari Rp. 1.000,- turun menjadi Rp. 6.00,-. Para supir-supir angkutan umum di daerah maupun di Ujung Pandang mulai sedikit lega sebab BBM tersebut harganya dapat dijangkau.

2. Kenaikan Tarif Angkutan

Naiknya harga BBM tersebut di atas, juga diikuti naiknya tarif angkutan, baik angkutan kota maupun angkutan daerah yang sebelumnya tarif angkutan kota jauh dekat dalam wilayah Kotamadya Ujung Pandang hanya Rp. 300,- menjadi Rp. 500,-. Tarif angkutan untuk ke dan dari daerah Tingkat II di kawasan Sulawesi Selatan juga ikut melembung tinggi bahkan nilainya menjadi dua kali lipat,

seperti tarif angkutan dari Ujung Pandang ke Pare-Pare sebelumnya Rp. 3.000,- menjadi Rp. 6.000,-.

Kenaikan itu tentu saja menggembirakan bagi para supir angkutan kota dan daerah, tetapi bagi masyarakat dan kalangan mahasiswa selaku pihak pengguna jasa sangat tidak setuju atas kenaikan tarif angkutan tersebut, terutama di kalangan mahasiswa yang tempat tinggalnya jauh dari kampus.

Kondisi waktu itu sangat memprihatinkan, dan masyarakat serta mahasiswa, meskipun hati nuraninya tidak dapat menerima baik kebijaksanaan itu, namun mereka membayar juga kenaikan seperti itu. Akhirnya para tukang becak pun kowalahan menerima penumpang, karena masyarakat Kotamadya Ujung Pandang umumnya memilih becak pada jarak tertentu daripada memilih mikrolet, sebab tarif becak tidak naik dan momen tersebut juga merupakan langkah strategis bagi para pengayuh becak untuk menarik simpatik masyarakat.

Keadaan tersebut hanya berlangsung kurang lebih satu bulan dan pulih kembali karena tarif angkutan berhasil diturunkan oleh mahasiswa yang melakukan aksi demonstrasi dan mengadukan masalah itu pada DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan selaku wakil rakyat.

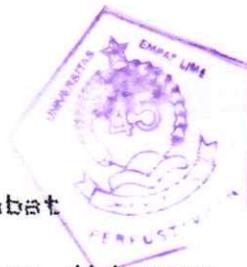
3. Tindakan Oknum ABRI

Tindakan yang dilakukan oleh oknum-oknum ABRI kepada mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang, seperti pemukulan, penyanderaan, penculikan, maupun meninggalnya beberapa mahasiswa yang ditembak oleh oknum-oknum ABRI pada saat sedang melakukan aksi demonstrasi memperjuangkan hak-hak rakyat yang tertindas.

Gerakan mahasiswa pun semakin gencar menentang keras tindakan ABRI tersebut yang dinilai tidak sesuai lagi dengan fungsi dan kedudukan ABRI selaku penegak hukum dan pelindung masyarakat.

Mahasiswa dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di daerah ini semakin meningkatkan aksinya, menentang keras kelakuan oknum ABRI menembak rekannya hingga meninggal dunia, serta menculik dan menahan demonstran.

Tindakan oknum ABRI pun mendapat kecaman dan sorotan dari berbagai kalangan ahli hukum, negarawan, politisi di daerah ini, sehingga lebih menambah motivasi para mahasiswa untuk mengecam oknum ABRI. Demonstrasi terus dilakukan, sampai akhirnya masalah itu menyeret oknum-oknum ABRI Mahkamah Militer untuk diproses secara hukum.



4. Korupsi yang Dilakukan oleh Pejabat

Aksi demonstrasi mahasiswa juga didorong oleh karena adanya perbuatan korupsi para pejabat tertentu di Kotamadya Ujung Pandang dan daerah Tingkat II di Propinsi Sulawesi Selatan yang dinilai oleh mahasiswa merugikan bangsa dan negara, sebab seharusnya dana itu digunakan untuk pembangunan guna mensejahterakan masyarakat, tetapi justru digunakan untuk memperkaya diri sendiri.

Pejabat seperti itu harus dipecat karena bukannya berupaya untuk meningkatkan bidang-bidang pembangunan, malah menghambat jalannya pembangunan. Pejabat dimaksud adalah Gubernur, Walikota serta sejumlah pejabat lainnya dalam jajaran Pemda Tingkat I dan Pemda Tingkat II. Meskipun saat ini masih diusut terus dan belum mendapat sorotan tajam karena melakukan korupsi seperti kasus Nurdin Halid dan Bupati Kepala Tingkat II Maros.

5. Penyalahgunaan Wewenang

Sorotan ini masih ditujukan kepada pemerintah, baik pusat maupun daerah, karena adanya pejabat-pejabat negara tertentu yang menyalahgunakan wewenangnya, dan merugikan bangsa serta negara. Hal ini diprotes oleh masyarakat yang diaplikasikan para

mahasiswa dalam bentuk aksi demonstrasi untuk mewakili kehendak rakyat.

Faktor-faktor tersebut diatas, hanya merupakan gambaran umum saja, sebab masih banyak faktor lainnya yang menjadi sebab atau latar belakang sehingga mahasiswa melakukan aksi demonstrasi khususnya di Kotamadya Ujung Pndang.

Sebagai bukti bahwa diKotamadya Ujung Pandang seringkali mahasiswa melakukan aksi demonstrasi yang dilatar belakangi oleh faktor-faktor yang dimaksudkan, di bawah ini dikemukakan data demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa.

TABEL 2
DATA DEMONSTRASI YANG DILAKUKAN MAHASISWA
1994 - 1998

Tahun	F
1994	40
1995	30
1996	40
1997	117
1998	190
Jumlah	317

Sumber : Sumber DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan, Tahun 1998.

Adapun frekuensi (F) aksi demonstrasi tersebut tahun 1994 terjadi 40 kali, 1995 ada 30 kali, 1996 ada 40 kali, 1997 ada 117 kali, dan 1998 ada 190 kali. Selama dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa setiap tahun semakin meningkat.

Menurut Lettu Pol. Abd. Salam, Kaur Bin OPS IPP Poltabes (wawancara, 5 Nopember 1998) bahwa:

Mulai dari tahun 1994 sampai 1998 ada 138 mahasiswa sebagai pelaku aksi demonstrasi di Kotamadya Ujung Pandang yang ditangkap, tetapi satupun tidak ada yang diajukan persoalannya sampai ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang. Mereka hanya diberikan pembinaan.

Penjelasan Abd. Salam ini menandakan bahwa para mahasiswa yang ditangkap dan diamankan di Poltabes Ujung Pandang hanya diberikan pembinaan dari segi saran karena tidak ada satupun mahasiswa yang diajukan perkaranya ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang.

Jamaluddin Rani, Staf Humas DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan, (wawancara, 1 Nopember 1998) mengatakan:

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang, dilakukan dengan cara:
a. Mereka turun ke jalan dengan tertib

- b. Mengunjungi Kantor DPRD TK. I Sulawesi Selatan sebanyak 5 - 20 orang
- c. Dari semua Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta di Kotamadya Ujung Pandang.
- d. Dalam bentuk arak-arakan dan spanduk yang bertuliskan harapan serta protes.

Penjelasan Andi Moni, Staf Humas DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan, (wawancara, 30 September 1998) mengatakan:

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang, dilakukan dengan cara turun ke jalan dengan menggelar spanduk yang bertuliskan protes, ajakan, harapan serta menghadap ke Kantor DPRD untuk menyampaikan maksudnya. Mereka senantiasa diterima dengan baik, ditampung masukan yang disampaikan tersebut untuk selanjutnya di bicarakan dalam tatanan politik.

Protes mahasiswa yang diwujudkan dalam bentuk aksi-aksi demonstrasi di Kotamadya Ujung Pandang, dilakukan dengan berbagai cara, seperti melakukan arak-arakan, protes dengan menggelar gambar serta tulisan yang berisi protes, ajakan dan harapan telah mewarnai Kotamadya Ujung Pandang baik sebelum maupun setelah reformasi di tegakkan.

Protes di atas, adalah dijamin kebenarannya menurut pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang unjuk rasa,

dan hal ini merupakan realisasi dari negara Indonesia sebagai negara hukum dan berbentuk negara demonstrasi, yakni suara rakyat harus lebih diutamakan, karena rakyatlah yang berdaulat.

Rusaknya tatanan negara, baik dalam bidang politik, hukum maupun politik salah satu faktor yang menjadi penyebabnya karena adanya oknum-oknum pejabat yang menyalah gunakan wewenangnya, atau dengan kata lain tindakannya dinilai merugikan bangsa dan negara. Misalnya dalam bidang ekonomi yaitu melakukan korupsi yang merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dan perekonomian negara kita.

Dalam bidang politik, misalnya menjalankan pemerintahan tidak lagi sesuai dengan tujuan negara dan aspirasi masyarakat, rakyat bukan lagi dihargai hak-haknya, tetapi rakyat semata-mata ditempatkan sebagai objek pembangunan yang seharusnya bukan saja sebagai objek pembangunan tetapi sekaligus juga sebagai subjek.

Namun di era reformasi sekarang ini, pemerintah telah berupaya semaksimal mungkin untuk mengembalikan hak-hak kedaulatan rakyat agar terwujud pembangunan yang sesuai dengan aspirasi masyarakat.



3.2. Tujuan Demonstrasi

Demonstrasi mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang, menurut Lukas, Staf DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan, (Wawancara, 28 September 1998) bertujuan :

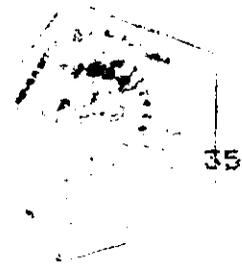
1. Agar terjadi perubahan dalam bidang politik, hukum dan ekonomi.
2. Untuk memberantas serta menghendaki agar pelaku tindak pidana korupsi diusut lebih lanjut.
3. Menggeser, memecat serta menurunkan pejabat di Kotamadya Ujung Pandang yang terlibat KKN.
4. Menurunkan Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Demikian pula, Agusaelim Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang, (Wawancara, 28 September 1998) mengatakan :

Tujuan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi pada era reformasi sekarang ini, tidak lain adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah agar dapat merubah sistem politik di negara kita supaya tercipta pemerintahan yang bersih dan KKN.

Aksi demonstrasi seperti pada uraian di atas, pada prinsipnya adalah untuk terwujudnya perubahan dalam bidang politik, hukum dan ekonomi.

Pejabat yang terlibat KKN sebaiknya harus diturunkan dari jabatannya karena hanya merugikan



masyarakat serta merusak sistem dan mekanisme politik di Indonesia pada umumnya, khususnya di Kotamadya Ujung Pandang.

Demonstrasi yang bertujuan mengubah ketentuan-ketentuan dalam berbagai bidang yang tidak relevan lagi dengan perkembangan zaman dengan unjuk rasa mogok makan dan lain sebagainya yang sifatnya turun ke jalan untuk melakukan aksi, agar dapat dipantau secara langsung oleh pihak-pihak yang berkompeten.

Untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang selama ini dirasakan oleh masyarakat sangat tidak sesuai dengan kondisi, keluhan itu oleh mahasiswa di aspirasikan melalui aksi demonstrasi turun ke jalan raya dengan menentang kebijaksanaan pemerintah pusat dan daerah.

Dalam melakukan aksi demonstrasi senantiasa terjadi rintangan dan ancaman karena dari pihak-pihak yang pro terhadap pemerintah, misalnya pihak Kepolisian dan ABRI melakukan tindakan kekerasan bahkan penganiayaan berat kepada mahasiswa yang sedang melakukan aksi demonstrasi tersebut.

Di sisi lain mahasiswa terkadang merusak mobil pejabat dan mobil angkutan umum, tujuannya tidak lain agar terjadi perubahan dalam kebijaksanaan

ekonomi, yakni harga bahan bakar minyak harus diturunkan karena harganya tidak dapat terjangkau oleh masyarakat.

Hal yang menarik untuk dicermati terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang, misalnya melakukan aksi demonstrasi karena menginginkan agar pelaku tindak pidana korupsi harus diproses atau ditindak lanjuti oleh posisi, jaksa dan para penegak hukum lainnya.

Baik dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di daerah ini serentak turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi. Tujuannya sama, yakni untuk memproses pelaku tindak pidana supaya di proses menurut hukum yang berlaku, sebab mahasiswa menilai perbuatan pejabat atau oknum-oknum penting lainnya itu sangat merugikan perekonomian negara yang merusak pula tatanan ekonomi nasional (Bina Baru, tgl. 6-11-1998).

Demonstrasi tersebut dilakukan dengan tertib yang dijaga ketat oleh pihak yang berwajib dalam hal ini polisi dan ABRI. Namun tidak terjadi insiden yang merusak atau membahayakan, tujuannya hanya satu yaitu mengusut Nurdin Halik dan Nasrun Abdullah yang melakukan tindak pidana korupsi (Fajar, 5-11-1998).

Unjuk rasa dan protes itu, dilakukan dengan protes melalui tulisan dan teriakan di jalan raya, kemudian mendatangi Kantor DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan berdialog dengan wakil-wakil rakyat di DPRD. Protes mahasiswa tersebut, kini telah menjadi kenyataan sebab Nurdin Halid telah diseret ke Pengadilan Negeri Ujung Pandang dan berkas Nasrun Abdullah sudah dilimpahkan ke jaksa. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi benar-benar diperhatikan oleh pemerintah.

Lukas Toding, mahasiswa Fakultas Hukum Atmajaya (wawancara, 26 September 1978) mengatakan tujuan mahasiswa melakukan demonstrasi yaitu:

1. Memberikan masukan kepada pemerintah, utamanya DPRD sebagai wakil rakyat;
2. Menginginkan agar terjadi perubahan dalam bidang hukum, politik dan ekonomi;
3. Menuntut oknum pejabat yang terlibat dari unsur KKN supaya diturunkan dari jabatannya
4. Untuk mewakili aspirasi rakyat menyampaikan ketidakeenangannya terhadap kebijaksanaan yang di ambil pemerintah selama ini; dan
5. Supaya Soeharto diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

Tujuan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi tampaknya adalah sama dari semua perguruan tinggi di daerah ini. Begitu pula penjelasan Subhan, mahasiswa IKIP Ujung Pandang yang dikenal sebagai aktivis dan reformasi (wawancara, 24 September 1998) bahwa:

Sebenarnya mahasiswa di daerah ini melakukan aksi demonstrasi, punya sisi dan tujuan yang sama, yakni menginginkan perubahan atau reformasi di segala bidang pembangunan. Termasuk perubahan dalam peta politik era Soeharto.

Menyimak kedua pendapat mahasiswa tersebut di atas, menunjukkan bahwa pada umumnya mahasiswa yang turun kejalan melakukan aksi demonstrasi dengan bentuk unjuk rasa, arak-arakan dan protes lewat tulisan, gambar maupun teriakan tujuannya adalah untuk mendesak Pemerintah agar merubah tatanan politik, hukum dan ekonomi yang lebih sesuai dengan kehendak rakyat tanpa mengabaikan kehendak pemerintah.

Sebagai gambaran, berikut ini dikemukakan pandangan 50 responden terhadap tujuan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang.

TABEL 3
TUJUAN DEMONSTRASI

Pertanyaan : Apakah Bapak/Ibu memahami tujuan aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di kotamadya Ujung Pandang?

N = 50

Nomor	Pemahaman	F	%
1	Tidak paham	7	14
2	Kurang paham	10	20
3	Cukup paham	13	26
4	Sangat paham	20	40
Jumlah		50	100

Sumber : Diolah dari angket, Tahun 1998

Pemahaman responden terhadap aksi demonstrasi mahasiswa seperti yang diuraikan pada tabel 3 di atas ternyata saling berbeda. Sebanyak dua responden (4 %) tidak memahami, 10 responden (20 %) kurang memahami tujuan tersebut, 13 responden (26 %) cukup memahami, 20 responden (40 %) sangat memahami dan lima responden (10 %) mengatakan ya paham tujuan demonstrasi.

Para responden di atas, memberikan pandangan tentang aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa seperti yang disajikan pada tabel berikut ini.

TABEL 4
PANDANGAN RESPONDEN TERHADAP AKSI DEMONSTRASI
YANG DILAKUKAN MAHASISWA

Pertanyaan : Bagaimana pandangan Bapak/Ibu terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa?

N = 50

Nomor	Pandangan	F	%
1	Tidak setuju	7	14
2	kurang setuju	14	18
3	Setuju	11	42
4	Cukup Setuju	18	26
Jumlah		50	100

Sumber : Diolah dari angket, Tahun 1998

Perbedaan pandangan responden pada tabel 4 di atas, ternyata lebih banyak setuju terhadap aksi demonstrasi yang dilakukan oleh kelompok mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang, tetapi, hanya sebagian kecil saja yang tidak setuju, karena responden lainnya masih mengatakan kurang setuju. Tapi yang mengatakan demikian hanya empat responden saja.

Akhirnya dapat dianalisa bahwa aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang selama ini cukup mendapat dukungan oleh masyarakat.

3.3. Pengaruh Demostrasi Terhadap Terjadinya Reformasi

Perombakan, penataan dan perubahan sistem politik, hukum dan pemerintahan disebut era reformasi tidak mudah untuk mewujudkannya, tetapi melalui perjuangan panjang yang sempat menelan beberapa mahasiswa yang memperjuangkan adanya perubahan di Indonesia.

Harus diakui bahwa sampai saat ini mahasiswa masih menempati urutan pertama dalam memperjuangkan mahasiswa tersebut, maka sebutan reformasi mungkin belum dapat terwujud. Meskipun reformasi di segala bidang sudah lama diperjuangkan, tetapi tidak dapat terealisasikan.

Gepanjang sejarah Orde baru di era kekuasaan Soeharto cukup banyak penyelewengan yang dilakukan dan dikecam keras oleh masyarakat, terutama dari kalangan negarawan, politikus dan ahli hukum. Tujuannya untuk menurunkan tahta Soeharto selaku Presiden Republik Indonesia, namun akhirnya yang berhasil menumbangkannya adalah mahasiswa secara serentak di seluruh Indonesia.

Turunnya Soeharto sebagai Presiden, telah membuka mata lebar-lebar dari semua kalangan yang



berkompeten bahwa protes, aksi, unjuk rasa yang lebih terkenal telah menunjukkan langkah nyata.

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia, karena keberhasilan mahasiswa melalui aksi demonstrasi, yang pada mulanya selalu mendapat tantangan berat dari berbagai kalangan yang berkompeten, terutama dari ABRI dan Polri yang selamanya hanya menilai bahwa aksi demonstrasi tersebut mengganggu jalannya pemerintahannya atau menghambat pembangunan.

Para mahasiswa ditangkap, diperlakukan tidak sesuai dengan hukum, bahkan ada yang meninggal dunia, baik di luar Kotamadya Ujung Pandang maupun di daerah. Perlakuan oknum ABRI tersebut semakin memancing emosi mahasiswa atau para reformasi muda untuk terus berjuang mengancam, memprotes tindakan ABRI dan aparat lainnya yang tidak sesuai lagi dengan tujuannya.

Sudah menjadi kenyataan bahkan menjadi sejarah di Indonesia bahwa aksi demonstrasi mahasiswa mampu menciptakan iklim baru dalam sistem politik, karena dengan demonstrasi tersebut lahirlah sistem pemerintahan yakni reformasi total yang bertujuan mengembalikan Indonesia sebagai negara demonstrasi.

dan bukan berdasarkan kekuasaan yang dibangun berdasarkan hukum yang tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Aksi demonstrasi mahasiswa di Indonesia, khususnya di Kotamadya Ujung Pandang, telah mendorong terjadinya perubahan dalam berbagai bidang pembangunan, seperti yang dikatakan oleh H. Mansjur Sjam, aparat pada Kantor DPRD Tingkat I Sulawesi Selatan (wawancara, 1 Nopember 1998) bahwa:

Pengaruh demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa terhadap reformasi di Indonesia pada umumnya dan khususnya di Sulawesi Selatan, yakni:

- a. Turunnya Soeharto selaku Presiden RI yang di gantikan oleh B.J. Habibie.
- b. Terungkapnya berbagai kasus korupsi yang di lakukan oleh pajabat tertentu.
- c. Terjadinya perubahan disegala bidang pembangunan yang bertujuan untuk menciptakan kondisi yang sejalan dengan hukum serta aspirasi masyarakat.
- d. Munculnya beberapa partai politik di tanah air.
- e. Turunnya beberapa pejabat penting, baik di pusat maupun di daerah yang terlibat KKN.

Turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang merupakan salah satu faktor penyebabnya karena mahasiswa melakukan aksi demonstrasi dalam bentuk unjuk rasa dan arak-arakan, protes dan

tatanan hukum di Indonesia tidak menentu saat itu. Tetapi yang dapat disaksikan saat ini suasana politik di Indonesia semakin transparan yang berorientasi pada negara demonstrasi yang berdasarkan hukum, bukan kekuasaan atau tidak menonjolkan kekuasaan belaka.

Pengaruh demonstrasi tersebut memang sangat nyata dalam kaitannya dengan perubahan berbagai bidang pembangunan, terutama dalam bidang hukum dan politik. Misalnya diusutnya Bupati Maros dan Nurdin Halid karena terlibat dalam tindak pidana korupsi, yang hingga kini Nurdin Halid sudah diproses di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, demikian pula Naerun Abdullah akan diseret ke Pengadilan.

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45"
Ashar Toputiri (wawancara, 1. Nopember 1998)
mengatakan:

Pengaruh demonstrasi yang dilakukan mahasiswa selama ini terhadap reformasi, yaitu terjadinya perubahan dari berbagai aspek kehidupan masyarakat. Misalnya perubahan dari segi hukum, politik yang saat jauh lebih baik dari masa sebelumnya.

Pendapat mahasiswa ini, yang juga mengaku turun ke jalan melakukan aksi demonstrasi sampai

sekarang ini sehingga terjadi reformasi di segala bidang, sesungguhnya telah oleh pihak merombak segala tatanan yang ada selama ini yang dianggap tidak sesuai lagi dengan kondisi perkembangan zaman.

Demonstrasi yang digelar mahasiswa di seluruh Indonesia di era reformasi sekarang ini, tujuannya adalah menuntut kepada pemerintah untuk melakukan perubahan di segala bidang pembangunan.

Dengan dilakukan aksi demonstrasi mahasiswa tersebut, kini sudah ada perubahan yang nyata dalam masyarakat termasuk dalam perubahan hukum yang saat ini sudah nyata-nyata dilakukan. Misalnya dengan menyeret pejabat negara tertentu ke meja hijau untuk diadili karena terlibat dalam KKN.

Di sisi lain, ad apula pejabat negara yang diturunkan dari jabatannya karena akibat mahasiswa melakukan aksi demonstrasi. Seperti halnya Soeharto diturunkan dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia.

3.4. Dampak Demonstrasi terhadap Kehidupan Masyarakat

Gerakan demonstrasi mahasiswa, secara langsung menimbulkan dampak terhadap kehidupan masyarakat, baik negatif maupun positif.

Demonstrasi yang kini mewarnai gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan reformasi total, telah mewujudkan berbagai perubahan yang dirasakan warga masyarakat yang sejak dahulu menginginkan terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.

Yang dialami sebelum era reformasi atau di masa pemerintahan Soehart, hak-hak warga negara seperti yang tercantum dalam pasal 28 Undang-undang Dasar 1945 seakan-akan dibatasi dan terselubung, padahal untuk mengeluarkan pendapat secara lisan dan tulisan dijamin dan itu tidak boleh dihalangi sebagaimana bentuk negara adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan belaka.

Perjuangan panjang para reformis-reformis muda telah berhasil membuahkan hasil untuk mendesak para penentu kebijakan untuk menata kembali negara sesuai dengan kehendak rakyat.

Dampak aksi demonstrasi yang dilakukan para reformis dan dirasakan oleh masyarakat, Nusalam Halim, seorang pengamat demonstrasi mahasiswa (wawancara, 30 September 1998) mengatakan:

Dampak negatif adanya aksi demonstrasi yang selama ini dilakukan masyarakat terhadap kehidupan masyarakat, yaitu:

- a. Digencetnya beberapa pejabat di daerah ini yang terlibat terbukti melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme atau (KKN).
- b. Jatuhnya beberapa orang sebagai korban reformasi dalam memperjuangkan hak-hak asasi warga masyarakat.
- c. Adanya ketidak jelasan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam bidang politik, ekonomi dan hukum yang menjadi sorotan para reformis kita.
- d. Masyarakat semakin cemas akan pelaksanaan pemilihan umum yang akan datang, sebab dengan mudah orang membentuk partai politik, dapat menjadi faktor penyebab terjadinya pertumpahan darah di saat kampanye yang akan datang.
- e. Legalitas berbagai ketentuan, Undang-undang dan peraturan lainnya selama dalam masa reformasi, seakan melemah dan terkesan hukum tidak diberlakukan.

Dampak negatif akibat aksi demonstrasi mahasiswa, meskipun di sisi lain telah dirasakan adanya pembaharuan, tetapi di sisi lainnya juga menimbulkan akibat negatif seperti pendapat tersebut di atas.

Sejak aksi demonstrasi mahasiswa terus berlangsung tidak sedikit pejabat yang cukup berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan karena kalau keputusan ini dinilai oleh mahasiswa menyimpang dari aturan hukum maka yang bersangkutan akan didemonstrasi. Agus Salim, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas "45" (wawancara, 28 September 1998) mengemukakan bahwa:

Karena demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa Presiden berhasil digulingkan, apabila kalau hanya Bupati dan Gubernur. Mahasiswa telah melakukan demonstrasi. Tujuannya agar pejabat yang memang terlibat KKN dapat tergulir atau diberhentikan dari jabatannya.

Penjelasan di atas, adalah patut untuk dipercaya, sebab kenyataannya Gubernur Sulawesi Selatan H.Z.B. Palaguna beberapa waktu lalu hampir diturunkan mahasiswa dari jabatannya karena diduga terlibat melakukan KKN, dan sampai sekarang ini dugaan bahwa H.B.Z. Palaguna terlibat KKN masih terus diusut dan diperjuangkan oleh mahasiswa melalui aksi demonstrasi.

Pada waktu yang bersamaan, hampir setiap Bupati dan Walikota Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan didemonstrasi oleh mahasiswa karena diduga terlibat KKN, seperti halnya Nasrun Amirullah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Maros. Begitu pula Dirut Puskud Hasanuddin Murdin Halid yang perkaranya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri untuk diproses lebih lanjut karena terlibat kasus KKN, dan hal ini terungkap karena aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa dan tidak menutup kemungkinan akan menyusut kasus-kasus pejabat lainnya yang terlibat KKN.

Dampak positif aksi demonstrasi terhadap kehidupan masyarakat yaitu terwujudnya reformasi secara menyeluruh dalam berbagai bidang pembangunan sehingga masyarakat telah merasakan adanya pembaharuan-pembaharuan atau perubahan yang dirasakannya jauh lebih baik kalau dibandingkan masa sebelum reformasi.

Diikuti, sudah tercatat beberapa langkah Pemda Sulawesi Selatan yang berbeda dengan "gaya" pemerintah Orde baru, namun komitmen terhadap aspirasi dan tuntutan reformasi masih terkesan diterima setengah hati oleh Pemda Sulawesi Selatan, apabila reformasi total juga belum dijalankan sepenuh hati.

Kebijakan yang telah digariskan dalam serapan agenda reformasi konstitusional, seolah hanya retorika untuk dibicarakan dan didiskusikan, guna menyenangkan para reformasi arus bawah tanpa ada tindak lanjut yang berarti seolah ada rintangan di tangan eksekutif. Namun, demonstrasi di era reformasi ini juga menimbulkan dampak sebagaimana pendapat 50 responden berikut ini:

TABEL 5
 PENDAPAT RESPONDEN MENGENAI DAMPAK DEMONSTRASI
 TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT
 Pertanyaan : Apa dampak demonstrasi terhadap
 kehidupan masyarakat

Nomor	Dampak	F	%
1	Sudah ada bidang pem- angunan yang menye- nangkan rakyat	24	48
2	Terungkapnya berbagai kaus KKN	10	20
3	Soeharto turun dari jabatannya	9	18
4	Situasi politik tidak jelas	3	6
5	Jalan menjadi macet	4	8
Jumlah		50	100

Sumber : Diolah dari angket, Tahun 1978.

Pendapat responden mengenai dampak demonstrasi terhadap kehidupan masyarakat seperti pada tabel 5 di atas, ternyata para responden lebih banyak yang mengatakan sudah ada bidang pembangunan yang menyenangkan rakyat, dan hanya sebagian kecil saja yang mengatakan situasi politik tidak menentu dan jalan macet.

Masih berkaitan dengan uraian tersebut di atas, ternyata ada di antara responden yang merasa

kurang senang jika mahasiswa melakukan aksi demonstrasi, seperti yang dikatakan oleh Dg. Lewang seorang sopir mobil angkutan kota (wawancara, 22 September 1998) bahwa:

Aksi demonstrasi yang dilakukan mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang juga menimbulkan dampak negatif karena jalan macet, akibatnya banyak sopir mobil angkutan kota kurang senang kalau mahasiswa melakukan demonstrasi. Karena selain menghalangi lalu lintas di jalan raya, juga menghambat sopir mengambil penumpang.

Penjelasan Dg. Lewang di atas, ternyata ada kaitannya dengan penjelasan Muh. Said Rum, warga Jalan Batua Raya (wawancara, 23 September 1998) mengatakan:

Aksi demonstrasi mahasiswa selain menimbulkan dampak positif. Juga menimbulkan dampak negatif. Seperti:

- a. Lalu lintas di jalan raya macet;
- b. Situasi negara semakin kacau dan
- c. Banyak pejabat yang terpaksa diturunkan dari jabatannya
- d. Mahasiswa menjadi korban akibat tindakan oknum ABRI dan Polri.
- e. Bukan menegakkan konstitusi, tapi malah merubah sistem yang ada, seperti pemilihan umum.

BAR 4

P E N U T U P

4.1. Kesimpulan

- a. Faktor yang melatarbelakangi para kelompok mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang melakukan aksi demonstrasi karena kenaikan bahan bakar minyak, kenaikan biaya transportasi angkutan, tindakan oknum ABRI, Korupsi dan penyalahgunaan wewenang, tapi yang paling dominan karena menginginkan sistem politik, hukum dan ekonomi ditata kembali sesuai dengan aspirasi masyarakat.
- b. Tujuan yang ingin dicapai kelompok mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang melakukan aksi demonstrasi yaitu agar terjadi perubahan dalam bidang politik, hukum dan ekonomi, untuk memberantas serta menghentikan tindak pidana korupsi, menggeser serta memecat serta menurunkan pejabat tertentu baik di pusat maupun di Kotamadya Ujung Pandang yang terlibat KKN serta menurunkan Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia.
- c. Pengaruh aksi demonstrasi mahasiswa terhadap terjadinya reformasi ekonomi, politik dan hukum

yaitu bahwa dengan adanya aksi demonstrasi yaitu terjadilah berbagai kebijaksanaan baru akan perubahan di bidang pembangunan serta lahirnya berbagai ketentuan baru yang jauh lebih baik dari sebelumnya.

4.2. Saran-saran

- a. Supaya mahasiswa di Kotamadya Ujung Pandang tidak melakukan aksi demonstrasi, tindakan oknum ABRI harus dihentikan serta tetanan politik, hukum maupun ekonomi disesuaikan dengan aspirasi masyarakat.
- b. Agar terwujud perubahan dalam bidang politik, hukum serta ekonomi, maka pejabat yang terlibat KKN baik di pusat maupun di Kotamadya Ujung Pandang diseret ke Pengadilan.
- c. Sebaliknya penataan dan perubahan di bidang pembangunan yang dilakukan pemerintah di era reformasi ini mencerminkan Indonesia sebagai negara demokrasi dan negara hukum yang mengembalikan hak-hak kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Zainal Abidin Farid dan Rachmad Baro, 1976. **Perbandingan Asas-Asas Hukum Adat Pidana Indonesia dengan Asas-Asas Pidana Eropa Barat dan Asas-asas Hukum Pidana Texas.** Umitoha, Ujung Pandang.
- Achmad Ali, 1978. **Mengadili Soeharto.** Fajar 28 September, Ujung Pandang.
- Daniel Lev, 1971. **Hukum dan Praktik di Indonesia.** Bina Aksara, Jakarta.
- Gabriel A. Almond, 1987. **Sosialisasi Kebudayaan dan Partisipasi Politik.** Gema Press, Jakarta.
- Imam Waluyo, Dkk, 1981. **Dialog Indonesia Kini dan Esok.** LEP-PENAS, Jakarta.
- Maeljetno, 1983. **Asas-Asas Hukum Pidana.** Bina Aksara, Jakarta.
- Marwan Mas, 1976. **Peranan Hukum Dalam Menunjang Pembangunan Nasional.** Diktat Fakultas Hukum Universitas "45" Ujung Pandang.
- Soedjono, D, 1985. **Sosiologi.** Alumni, Bandung.
- Soedjono Soekanto, 1986. **Sosiologi Suatu Pengantar.** Bina Aksara, Jakarta.
- Soedjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1980. **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat.** Rajawali Press, Jakarta.
- Sahat Simamora, 1983. **Sosiologi Suatu Pengantar.** Bina Aksara, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikro, 1986. **Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia,** Eresco, Bandung.
- Bina Baru, 1988. **Orang yang Memanfaatkan Reformasi Berhadapan dengan ABRI.** 19 September, Ujung Pandang.
- Fajar, 1978. **Digoyang reformasi.** 3 Oktober, Ujung Pandang.
- Fajar, 1978. **Mobil Pajero Nasrun Disita.** 28 September Ujung Pandang.
- Pratama, 1978. **Reformasi Bukan Retorika.** 20 September, Ujung Pandang.